

**PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2027**



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI KAMIS, 10 SEPTEMBER 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KEBUMEN
FRAKSI AMANAT SEJAHTERA**
Jl Merdeka No. 6 Kebumen, Jawa Tengah



**PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2027**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

**Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati,
Kepala OPD ,Para Kepala Bagian Sekda, Camat, Pimpinan
BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris
DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen.**

**Ysh. Tamu undangan, Insan pers, rekan-rekan LSM, Pemirsa
Kebumen TV dan pendengar radio IN FM yang budiman.**

Alhamdulillah robbil alamin puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. *Aamiin ya robal'alaim.*

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Merupakan suatu kehormatan bagi kami **Fraksi Amanat Sejahtera** telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027**, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bupati dan Jajaran Eksekutif yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027** dan mengikuti agenda pembahasan bersama dengan DPRD.
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Setelah mencermati Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027**. Izinkan kami **Fraksi Amanat Sejahtera** menyampaikan Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut:

1. Tentang Arah Kebijakan RAPBD 2027

Fraksi Amanat Sejahtera mencermati bahwa RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada tema ***“Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”***.

Fraksi Amanat Sejahtera pada prinsipnya mengapresiasi arah kebijakan tersebut. Namun demikian, kami berpandangan bahwa tema pembangunan harus benar-benar diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Jangan sampai APBD hanya berhasil menyelesaikan proses administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran terserap, tetapi seberapa besar persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan.

2. Tentang Kemandirian Fiskal Daerah

Fraksi Amanat Sejahtera memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah. Dalam RAPBD 2027, PAD direncanakan sebesar **Rp582,76 miliar** atau **19,32 persen** dari total pendapatan, sedangkan pendapatan transfer mencapai **Rp2,43 triliun** atau **80,68 persen**.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

Fraksi Amanat Sejahtera memahami bahwa transfer pemerintah pusat merupakan bagian penting dalam struktur APBD. Namun ketergantungan yang terlalu besar harus menjadi alarm bagi kita semua.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi dan intensifikasi PAD secara sehat, bukan dengan membebani masyarakat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola, digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta menggali potensi ekonomi baru yang tidak mematikan aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

3. Tentang Kualitas Belanja Daerah

Fraksi Amanat Sejahtera mencermati belanja daerah sebesar **Rp3,09 triliun**, dengan belanja operasi sebesar **Rp2,068 triliun** atau **66,89 persen**, sedangkan belanja modal sebesar **Rp366,67 miliar** atau **11,86 persen**.

Fraksi Amanat Sejahtera memahami bahwa belanja operasi memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas, kita perlu memastikan bahwa komposisi belanja benar-benar memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan yang memiliki dampak langsung dan berkelanjutan.

Kami ingin memastikan bahwa belanja daerah tidak sekadar “*habis dibelanjakan*”, tetapi mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperkuat pertanian, membuka lapangan kerja, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.

4. Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Fraksi Amanat Sejahtera memberikan perhatian khusus terhadap **pokok-pokok pikiran DPRD**.

Kami ingin menegaskan bahwa **pokok-pokok pikiran DPRD** bukanlah sekadar daftar usulan kegiatan dari anggota DPRD. Pokok-pokok pikiran merupakan bagian dari mekanisme untuk membawa aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui pelaksanaan fungsi representasi DPRD agar menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, **Fraksi Amanat Sejahtera** berpandangan bahwa terdapat satu pertanyaan penting yang harus dijawab dalam pembahasan RAPBD 2027:

Sejauh mana aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui DPRD telah diterjemahkan secara nyata ke dalam program dan kegiatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027?

Kami tidak menginginkan adanya jarak antara proses penyerapan aspirasi dengan proses penganggaran.

Masyarakat telah menyampaikan kebutuhannya. Anggota DPRD telah menyerap aspirasi tersebut. Pemerintah Daerah bersama DPRD kemudian menyusun perencanaan pembangunan.

Maka logikanya sederhana: aspirasi harus memiliki jalan menuju perencanaan, dan perencanaan harus memiliki jalan menuju penganggaran.

Apabila tidak seluruh pokok-pokok pikiran dapat diakomodasi, **Fraksi Amanat Sejahtera** meminta agar Pemerintah Daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kriteria, alasan, serta prioritas usulan yang dapat maupun belum dapat dimasukkan dalam RAPBD 2027.

Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa pokok-pokok pikiran hanya berhenti pada tahap penyampaian aspirasi.

5. Tentang Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan

Tema RAPBD 2027 memberikan penekanan pada pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas pelayanan dasar.

Fraksi Amanat Sejahtera meminta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek yang

terlihat besar, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa.

Jalan, jembatan, irigasi, drainase, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, dan infrastruktur ekonomi masyarakat harus mendapatkan perhatian berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya.

Dalam hal ini, **pokok-pokok pikiran DPRD** dapat menjadi salah satu sumber informasi penting mengenai persoalan konkret yang ditemukan anggota DPRD ketika bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat.

6. Tentang Defisit dan Pembiayaan

RAPBD 2027 direncanakan mengalami defisit sebesar **Rp75,23 miliar** yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan.

Fraksi Amanat Sejahtera dapat memahami penggunaan pembiayaan sepanjang dilakukan secara hati-hati, terukur, dan memiliki dasar perencanaan yang jelas.

Namun **Fraksi Amanat Sejahtera** meminta agar penggunaan SiLPA sebagai salah satu sumber pembiayaan tidak menjadi kebiasaan yang menunjukkan adanya ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran secara optimal.

Setiap rupiah yang masuk dalam APBD harus memiliki target manfaat yang jelas. Demikian pula setiap rupiah yang tidak

terserap harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin baik.

7. Tentang Transparansi dan Akuntabilitas

Fraksi Amanat Sejahtera sependapat bahwa RAPBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan merupakan gambaran komitmen pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, **Fraksi Amanat Sejahtera** meminta agar pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara terbuka, objektif dan berbasis data.

Kami juga mendorong agar masyarakat dapat mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga untuk apa anggaran tersebut, siapa penerima manfaatnya, di mana lokasinya, serta apa indikator keberhasilannya.

Termasuk terhadap usulan-usulan yang berasal dari **pokok-pokok pikiran DPRD**, perlu terdapat mekanisme yang transparan sehingga dapat diketahui prosesnya sejak pengusulan, verifikasi, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

8. Tentang Kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD

Fraksi Amanat Sejahtera memandang bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD adalah hubungan kemitraan yang

harus dibangun dalam kerangka checks and balances, bukan hubungan untuk saling melemahkan.

Kritik DPRD bukan berarti menolak pemerintah daerah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan agar kebijakan pemerintah benar-benar berada pada jalur kepentingan masyarakat.

Karena itu, **Fraksi Amanat Sejahtera** berharap seluruh pembahasan RAPBD 2027 dilakukan dengan semangat yang sama: bukan siapa yang menang dalam pembahasan anggaran, tetapi apakah masyarakat Kebumen yang menjadi pemenangnya.

9. Penutup

Akhirnya, **Fraksi Amanat Sejahtera** berharap RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan perubahan.

Kami percaya bahwa keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengurangi keberpihakan kepada masyarakat. Justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, diperlukan keberanian untuk menentukan prioritas, ketelitian dalam mengalokasikan anggaran, serta konsistensi dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat.

Pokok-pokok pikiran DPRD harus menemukan tempat dalam proses pembangunan, bukan karena kepentingan anggota

DPRD, tetapi karena di dalamnya terdapat suara masyarakat yang telah diserap melalui proses representasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu membutuhkan penjelasan mengenai berapa besar APBD kita.

Masyarakat membutuhkan jawaban yang lebih sederhana:

Apa yang berubah dalam kehidupan mereka setelah APBD tersebut dilaksanakan?

Fraksi Amanat Sejahtera siap mengikuti pembahasan lebih lanjut secara konstruktif, kritis dan bertanggung jawab, dengan satu orientasi utama: **APBD untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.**

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

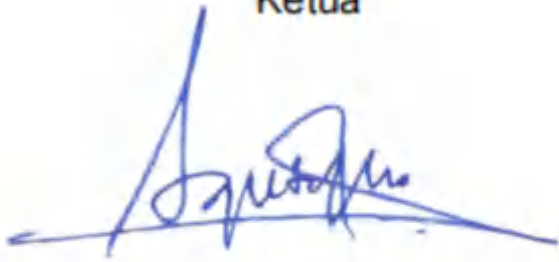
Demikian pembacaan Pandangan Umum **Fraksi Amanat Sejahtera** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027** , apabila dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi banyak hal-hal yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kebumen, 10 September 2026

**FRAKSI AMANAT SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



AGUS SUPRIYANTO, S.Sos

Sekretaris



SIGIT RAGIL SAPTO HADI, AMK